

Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Urban Farming di Surabaya

Kurnia Sri Dewi^{1*}, Yusuf Hariyoko², Hasan Ismail³

¹⁻³Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

Alamat: Jalan Semolowaru No. 45, Surabaya

Korespondensi penulis: Kurniadewi2908@gmail.com

Abstract. *This study explores the stakeholder synergy in the development of urban farming programs in Surabaya. Using qualitative descriptive methods, data was collected through interviews, documentation, and observation involving the DKPP, agricultural extension officers, farmer groups, and the local community. The findings indicate that strong commitment, competence, awareness, and continuity are the driving factors behind successful urban farming implementation. However, challenges such as declining active farmer groups and limited facilities must be addressed. This research contributes to the understanding of sustainable food security policies in urban settings.*

Keywords: *Food Security, Stakeholder Synergy, Urban Farming.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji sinergitas para pemangku kepentingan dalam pengembangan program urban farming di Surabaya. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi yang melibatkan DKPP, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen, kompetensi, kesadaran, dan kontinuitas menjadi faktor utama keberhasilan implementasi urban farming. Namun, tantangan seperti menurunnya jumlah kelompok tani aktif dan keterbatasan fasilitas masih harus diatasi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman kebijakan ketahanan pangan berkelanjutan di wilayah perkotaan.

Kata kunci: sinergitas stakeholder, pertanian perkotaan, ketahanan pangan

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan pesat urbanisasi di berbagai kota besar Indonesia, termasuk Surabaya, membawa dampak besar terhadap pola pemanfaatan ruang, lingkungan, dan sistem ketahanan pangan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman, komersial, atau industri menyebabkan menyempitnya lahan produksi pangan di wilayah urban. Di sisi lain, kebutuhan akan pangan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dan dinamika sosial ekonomi masyarakat kota. Sebagai respons terhadap tantangan ini, konsep urban farming atau pertanian perkotaan mulai diterapkan di sejumlah wilayah sebagai bentuk adaptasi dan inovasi dalam menciptakan sistem pangan yang tangguh dan mandiri di tengah keterbatasan ruang. Urban farming tidak hanya menjadi solusi terhadap persoalan ketersediaan pangan lokal, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan kualitas lingkungan, memperkuat solidaritas sosial, dan memberdayakan masyarakat ekonomi lemah.

Pemerintah telah memberikan dukungan terhadap urban farming melalui berbagai kebijakan dan program. Di tingkat nasional, Kementerian Pertanian telah merancang sejumlah kebijakan guna mendorong pengembangan pertanian kota sebagai upaya

memperkuat produksi pangan secara mandiri di wilayah perkotaan. Salah satu langkah penting adalah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2020–2024 yang mencakup peningkatan produktivitas pangan, termasuk di kawasan urban. Sementara itu, di level daerah, Pemerintah Kota Surabaya turut mengembangkan berbagai inisiatif urban farming yang dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), antara lain melalui program Kampung Organik dan Green and Clean. Meskipun demikian, pelaksanaan program-program ini masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, khususnya dalam aspek koordinasi antarinstansi dan rendahnya partisipasi masyarakat (Tiara Irawanti, Meidyas Riska, 2013).

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), program urban farming di Surabaya telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Program ini tidak hanya memperluas praktik pertanian di wilayah perkotaan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mendorong aktivitas yang produktif di kalangan warga, pemerintah, maupun lingkungan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa urban farming telah diterapkan secara merata di seluruh kecamatan, termasuk di kawasan padat penduduk. Program ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemandirian dalam penyediaan pangan serta pemenuhan gizi keluarga, yang pada akhirnya bertujuan untuk menekan angka kemiskinan. Walaupun memberikan dampak positif yang nyata, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti kebutuhan akan pelatihan yang lebih komprehensif dan dukungan yang berkelanjutan

Di Surabaya, program urban farming telah digalakkan sejak beberapa tahun terakhir melalui peran aktif Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Program seperti *KaSurBoyo*, eduwisata pertanian, dan lomba urban farming merupakan wujud komitmen pemerintah dalam membangun ketahanan pangan berbasis masyarakat. Namun, implementasi program ini tidak terlepas dari sejumlah kendala, seperti lemahnya regenerasi kelompok tani, keterbatasan sarana, serta masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat di beberapa wilayah.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya memiliki tanggung jawab utama dalam merancang hingga menjalankan kebijakan urban farming. DKPP aktif memberikan pelatihan, distribusi bibit tanaman, serta pendampingan teknis kepada masyarakat dalam upaya mendukung pengembangan pertanian perkotaan. Salah satu program andalannya, Kampung Sayur Suroboyo (*KaSurBoyo*), dirancang untuk

memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Selain itu, DKPP juga mengoptimalkan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), khususnya lahan-lahan milik pemerintah, sebagai area budidaya tanaman obat keluarga dan pertanian produktif. Dalam aspek pemasaran, DKPP memfasilitasi hasil panen urban farming melalui kegiatan bazar tani dan jaringan pasar lokal. Pemerintah Kota Surabaya menargetkan program ini mampu mencukupi hingga 60% kebutuhan pangan warga. Dengan langkah-langkah tersebut, DKPP menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, serta menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih hijau dan berkelanjutan (Rizky, 2024).

Dalam konteks tersebut, sinergitas antar pemangku kepentingan menjadi faktor kunci keberhasilan. Kolaborasi antara pemerintah, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan sistem pertanian kota yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana bentuk kerja sama dan peran masing-masing aktor dalam mendukung pengembangan urban farming di Kota Surabaya, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang masih dihadapi serta potensi penguatannya di masa mendatang.

2. KAJIAN TEORITIS

Urban farming atau pertanian kota merupakan bentuk inovasi dalam pemanfaatan ruang terbatas di kawasan perkotaan untuk kegiatan produksi pangan. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan pangan di kota-kota besar yang dihadapkan pada keterbatasan lahan hijau. Urban farming tidak hanya berperan dalam menyediakan sumber pangan lokal, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) melalui peningkatan kualitas lingkungan, penguatan ekonomi lokal, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan berbasis komunitas.

Menurut (Septya et al., 2022), urban farming merupakan bagian dari ruang terbuka hijau produktif yang memiliki nilai ekologis, ekonomi, dan sosial. Dalam pelaksanaannya, urban farming sangat bergantung pada peran dan keterlibatan berbagai pihak, sehingga dibutuhkan suatu pendekatan kolaboratif. Oleh karena itu, teori sinergitas stakeholder menjadi penting untuk memahami dinamika kerja sama yang terjalin antar aktor dalam sistem ini. Teori sinergitas stakeholder menekankan bahwa keberhasilan suatu program sangat dipengaruhi oleh interaksi harmonis antara pihak-pihak yang terlibat. Setiap stakeholder memiliki kepentingan, peran, dan sumber daya yang berbeda, namun saling

melengkapi dalam proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Dalam konteks urban farming, sinergitas mencakup komitmen, kompetensi, kesadaran, serta kontinuitas dari masing-masing pihak seperti pemerintah, penyuluh lapangan (PPL), kelompok tani, dan masyarakat umum.

Beberapa penelitian sebelumnya turut memperkuat pentingnya pendekatan ini. (Hidayat et al., 2022) menemukan bahwa urban farming memiliki potensi besar dalam mendukung akses pangan berkelanjutan apabila didukung oleh kolaborasi lintas sektor dan pendekatan berbasis komunitas. Sementara itu, (Triwahyuni et al., 2024) menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dan faktor sosial ekonomi dalam menentukan keberhasilan program urban farming di Surabaya. Penelitian lain oleh (Gabe Arif D S, Yani K, Nur Aisyah A, 2022) juga menekankan bahwa budaya lokal dan dukungan komunitas memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan kegiatan pertanian perkotaan, terutama di masa krisis seperti pandemi.

Berdasarkan kerangka teoritis dan temuan-temuan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana bentuk dan tingkat sinergi antar stakeholder dalam pengembangan urban farming di Kota Surabaya. Meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa semakin tinggi tingkat sinergitas stakeholder, maka semakin besar pula peluang keberhasilan program urban farming dalam meningkatkan ketahanan pangan kota secara berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bentuk sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan urban farming di Kota Surabaya. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara kontekstual dan menyeluruh, khususnya dalam memahami peran, interaksi, serta dinamika kolaborasi antara stakeholder. Lokasi penelitian dipusatkan di Kota Surabaya, dengan fokus pada wilayah-wilayah yang menjadi sasaran program urban farming oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan aktif masyarakat dan kelompok tani dalam program urban farming, serta keberadaan infrastruktur pendukung seperti greenhouse atau kawasan eduwisata pertanian.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap berbagai aktivitas urban farming. Informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah (DKPP), penyuluh

pertanian lapangan (PPL), perwakilan kelompok tani, dan masyarakat pelaku urban farming. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan siapa saja yang paling memahami dan terlibat langsung dalam program. Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri, dibantu dengan pedoman wawancara dan lembar observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan resmi DKPP, dokumen kebijakan, serta publikasi terkait program urban farming di Surabaya.

Teknik analisis data mengikuti model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis dilakukan secara simultan selama proses pengumpulan data untuk menjaga konsistensi dan validitas interpretasi. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, guna memastikan keakuratan informasi dari berbagai perspektif. Hasil uji keabsahan menunjukkan bahwa data yang diperoleh memiliki konsistensi antar informan dan relevansi dengan konteks lapangan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komitmen Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Urban Farming di Surabaya

Komitmen mencerminkan tingkat loyalitas individu terhadap suatu organisasi serta kesediaannya untuk terus berperan aktif dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari organisasi tersebut (Steers, n.d.). Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya menunjukkan tingkat komitmen yang tinggi dalam mendukung pengembangan urban farming. Hal ini diwujudkan melalui peluncuran program *Kampung Sayur Suroboyo* (KaSurBoyo), penyediaan fasilitas seperti bibit, pupuk, dan peralatan hidroponik, serta penyelenggaraan pelatihan secara berkala. DKPP juga memfasilitasi kelompok tani melalui bazar tani dan festival urban farming sebagai ajang promosi hasil pertanian warga. Komitmen DKPP menunjukkan kehadiran pemerintah sebagai aktor utama yang memiliki political will dan kapasitas kelembagaan. Hal ini sesuai dengan konsep sinergitas stakeholder yang menekankan pentingnya dukungan regulasi dan fasilitasi dari lembaga formal sebagai motor penggerak program (Moleong, 2018).

Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) menjadi perpanjangan tangan teknis dari pemerintah dalam mendampingi warga. Kehadiran mereka tidak hanya bersifat instruksional, tetapi juga emosional, karena mampu membangun kepercayaan warga. Meskipun intensitas kunjungan berbeda-beda, kehadiran PPL minimal sebulan sekali

memberikan motivasi dan arahan teknis dalam pemeliharaan tanaman serta pengelolaan kebun. Peran aktif PPL menguatkan dimensi humanistik dalam pembangunan pertanian kota, sejalan dengan teori pembangunan partisipatif yang mengedepankan pendekatan bottom-up dalam penyuluhan.

Sebagian besar kelompok tani menunjukkan komitmen tinggi melalui kegiatan berkala seperti kerja bakti, pengelolaan bank sampah, dan pengembangan kebun kolektif. Namun, permasalahan muncul pada aspek keberlanjutan karena dominasi anggota berusia lanjut dan minimnya partisipasi generasi muda. Keterlibatan kelompok tani mencerminkan kekuatan sosial-komunal dalam mendukung program pemerintah. Namun, regenerasi menjadi isu strategis yang perlu diatasi agar keberlanjutan dapat terjaga, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Nurjismi (2021) tentang pentingnya peran usia produktif dalam ketahanan pangan perkotaan.

Keterlibatan masyarakat tampak dari antusiasme dalam memanfaatkan lahan pekarangan, mengikuti eduwisata, dan membeli hasil panen lokal. Namun, partisipasi masih terbatas pada kawasan tertentu yang sudah mendapat pendampingan intensif. Masih terdapat kesenjangan partisipasi antarwilayah, terutama di lingkungan padat atau kurang akses informasi. Partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh akses informasi, pengalaman langsung, dan nilai manfaat yang dirasakan. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan komitmen warga memerlukan pendekatan edukatif dan pemberdayaan secara konsisten.

Tabel 1. Data Lapangan

Stakeholder	Bentuk Komitmen	Analisis
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Program KaSurBoyo, pelatihan, bibit, pupuk, fasilitas	Komitmen institusional yang kuat dan terstruktur
Penyuluh Lapangan Pertanian	Pendampingan teknis, motivasi, pelatihan lapangan	Keterlibatan langsung meningkatkan kepercayaan dan efektivitas pembinaan
Kelompok Tani	Kerja bakti, pengelolaan kebun dan bank sampah	Komitmen sosial tinggi namun rawan stagnasi karena minim regenerasi
Masyarakat	Pemanfaatan pekarangan, eduwisata, partisipasi festival	Komitmen tumbuh di wilayah dengan bimbingan intensif

Sumber: Hasil olahan data lapangan, 2025

Hasil penelitian ini menguatkan pemikiran bahwa komitmen stakeholder adalah elemen utama dalam membangun sinergitas lintas sektor dalam program pembangunan sosial. Praktisnya, Pemerintah Kota Surabaya melalui DKPP telah membentuk fondasi

kelembagaan yang cukup kuat. Namun, untuk menjaga kontinuitas, perlu dilakukan perluasan pendampingan berbasis komunitas dan penguatan kaderisasi agar program tidak hanya berjalan di beberapa titik, tetapi merata di seluruh kota.

Tabel 2. Data Stakeholder Dalam komitmen Pengembangan Urban Farming Di Surabaya

Nama Instansi/Perusahaan	Bentuk dukungan/peran dalam program
PT Petrokimia Gresik	Memberikan bantuan berupa pupuk kepada kelompok tani serta peserta dalam ajang kompetisi urban farming.
PT West Seed Indonesia	Menyalurkan benih tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, dan melon guna mendukung kegiatan budidaya.
UPN Veteran Jawa Timur	Melibatkan dosen dan mahasiswa dalam mendukung kegiatan edukasi di bidang pertanian, pelatihan teknis, serta program pengabdian kepada masyarakat.
Dosen UWK Surabaya	Dosen dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS) berperan sebagai pemateri, pelatih, sekaligus pembimbing dalam pelaksanaan program urban farming yang diselenggarakan oleh DKPP.

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya

Komunikasi yang dijalankan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya dalam pelaksanaan program urban farming bersifat inklusif dan melibatkan berbagai sektor. DKPP tidak hanya mengandalkan peran dari internal pemerintah, tetapi juga menjalin kerja sama strategis dengan pihak swasta seperti PT Petrokimia dan PT West Seed Indonesia, serta melibatkan kalangan akademisi dari UPN Jawa Timur dan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Bentuk kolaborasi ini diwujudkan melalui pembentukan tim urban farming yang terdiri dari tiga unsur utama dengan fungsi yang saling mendukung.

Kompetensi Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Urban Farming di Surabaya

Kompetensi adalah karakteristik atau atribut fundamental yang dimiliki oleh seseorang, yang secara signifikan memengaruhi kemampuannya dalam melaksanakan tugas secara optimal dan mencapai hasil kerja yang unggul dalam konteks atau bidang pekerjaan tertentu (Lyle M. Spencer, n.d.). Kemampuan berkolaborasi antara berbagai pihak dalam mendukung pengembangan urban farming di Surabaya mencerminkan

adanya kapasitas teknis, pengetahuan, dan keterampilan yang saling melengkapi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), kelompok tani, masyarakat, akademisi, dan sektor usaha masing-masing memiliki peran dan keahlian yang berbeda namun saling terkait. DKPP memiliki kapabilitas dalam memberikan pelatihan teknis, menyediakan sarana produksi, serta membangun infrastruktur seperti greenhouse. Kelompok tani dan masyarakat mampu menerapkan berbagai metode tanam modern seperti hidroponik dan vertikultur di lahan terbatas. Selain itu, keterlibatan mahasiswa melalui program eduwisata dan pelatihan masyarakat turut memperkaya pengetahuan warga mengenai pertanian kota. Sementara itu, pihak swasta dan DKPP juga membantu dalam aspek pemasaran dan promosi hasil pertanian melalui kegiatan seperti festival dan bazar tani.

Tabel 3. Data Kompetensi Pemangku Kepentingan Urban Farming Di Kota Surabaya

Jenis Kompetensi	Pemangku Kepentingan	Hasil Temuan	Interpretasi
Kompetensi teknis pertanian	DKPP Surabaya	Melaksanakan pelatihan, menyediakan bibit dan pupuk, serta membangun rumah kaca di beberapa wilayah kota	DKPP menunjukkan kapabilitas institusional yang baik dalam pengembangan urban farming secara sistematis dan profesional
Pendampingan dan Monitoring	Penyuluh Pertanian Lapangan	PPL secara rutin melakukan pendampingan ke kelompok tani aktif dan mengevaluasi kegiatan pertanian serta produktivitas lahan urban farming.	PPL memiliki keahlian dalam mentransfer pengetahuan teknis pertanian kepada masyarakat
Inovasi dan metode pertanian	Kelompok tani	Memanfaatkan sistem hidroponik, tasapot, dan vertikultur, serta menerapkan pengelolaan sampah	Kemampuan beradaptasi terhadap metode baru sangat penting untuk menjaga kelangsungan program urban farming.
Pengelolaan lahan dan sumber daya	Masyarakat dan kelompok tani	Menggunakan lahan terbatas di lingkungan padat dengan bantuan	Menunjukkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, namun

		pelatihan dari instansi pemerintah.	masih memerlukan penguatan dari sisi kelembagaan dan pendampingan jangka panjang.
Edukasi dan kesadaran lingkungan	Akademisi dan Mahasiswa	Melalui program eduwisata dan penyuluhan di sekolah serta masyarakat tentang pertanian perkotaan berkelanjutan.	Peran akademik sangat krusial dalam mentransfer pengetahuan serta meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya urban farming.
Promosi dan pemasaran produk	DKPP & Dunia Usaha	Menggelar bazar seperti Dapurbara dan festival urban farming, serta mendampingi proses pengemasan dan promosi produk hasil tani.	Kompetensi dalam promosi masih dalam pengembangan. Dukungan dunia usaha dan fasilitasi akses pasar perlu diperkuat agar produk lebih kompetitif dan berkelanjutan.

Sumber: Di Olah Peneliti

Dalam menjalankan program urban farming, kolaborasi antar pemangku kepentingan dilakukan melalui kerja sama lintas sektor yang terstruktur dan berkelanjutan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Surabaya berperan sebagai koordinator utama yang menyatukan kontribusi dari instansi pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, komunitas lokal, hingga media. Setiap stakeholder dilibatkan sesuai dengan fungsi dan kapasitasnya masing-masing, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Wujud kolaborasi ini tampak melalui forum komunikasi yang dilakukan secara rutin, pembagian tugas yang jelas, serta penanganan masalah secara bersama-sama di lapangan, demi menjamin keberlanjutan program urban farming di Surabaya.

Tingkat Kesadaran Antar Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Urban Farming di Surabaya

Kesadaran masyarakat merujuk pada kondisi psikologis individu maupun kelompok yang mencerminkan tingkat pemahaman, kepedulian, dan keterlibatan mereka terhadap permasalahan sosial yang berlangsung di lingkungan sekitarnya (Kartono, n.d.).

Tingkat kesadaran antar pemangku kepentingan dalam pengembangan urban farming di Surabaya menunjukkan adanya variasi yang dipengaruhi oleh fungsi, kepentingan, dan peran masing-masing pihak. DKPP sebagai leading sector memiliki tingkat kesadaran strategis yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan dan program jangka panjang yang diluncurkan, seperti KaSurBoyo, Festival Urban Farming, dan Dapurbara. Kesadaran ini tercermin dari keberhasilan DKPP dalam membangun kolaborasi dengan dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Sementara itu, para penyuluh pertanian (PPL) memainkan peran penting dalam menjaga kesinambungan kesadaran masyarakat di tingkat bawah. Mereka tidak hanya memberikan informasi teknis, namun juga membangun kedekatan emosional yang penting untuk mempertahankan minat masyarakat dalam praktik urban farming.

Tabel 4. Data Tingkat Kesadaran Antar Pemangku Kepentingan Terhadap Urban Farming

No	Pemangku Kepentingan	Indikator Kesadaran	Keterangan
1.	DKPP Surabaya	Menjalankan program jangka panjang dengan tujuan memenuhi 60% kebutuhan pangan dari sumber lokal.	Tingkat tinggi: merumuskan kebijakan, menyelenggarakan pelatihan, aktif dalam kegiatan bazar, serta menjalankan program KaSurBoyo.
2.	Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL)	Memberikan edukasi secara berkala dan tanggap terhadap kebutuhan yang muncul di tingkat kelompok.	Tingkat tinggi: melakukan pendampingan setiap bulan serta menyelenggarakan pelatihan yang disesuaikan dengan permasalahan nyata di lapangan.
3.	Kelompok Tani	Terlibat secara aktif dalam pengelolaan lahan dan produksi, namun masih ada sebagian yang belum melakukan pencatatan terhadap hasil panen.	Tingkat kesadaran berada pada kategori sedang hingga tinggi; pemahaman cukup baik, namun masih lemah dalam aspek ketertiban administrasi.

4.	Masyarakat	Sebagian besar masih bersikap pasif dan cenderung bergantung pada pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sayuran.	Tingkat kesadaran tergolong rendah hingga sedang; membutuhkan edukasi serta pendekatan yang dilakukan secara terus-menerus.
5.	Akademisi	Menyediakan dukungan dalam bentuk pendampingan, kegiatan penelitian, serta penyelenggaraan pelatihan.	Tingkat tinggi: Kolaborasi dengan UPN Jawa Timur dan UWKS berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas masyarakat.

Sumber: Di Olah Peneliti

Kesadaran kelompok tani cenderung bervariasi. Di satu sisi, kelompok yang aktif sangat antusias karena merasakan langsung manfaat ekonomi dan sosial dari urban farming. Namun di sisi lain, terdapat penurunan kesadaran di beberapa wilayah yang diakibatkan oleh kurangnya sarana, tidak optimalnya pendampingan, atau ketidaksesuaian hasil panen dengan harapan. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi dan intervensi yang berkelanjutan dari pemerintah agar program tidak berhenti di tengah jalan. Masyarakat umum, terutama di wilayah perkotaan padat, masih memiliki tingkat kesadaran yang beragam. Sebagian tertarik pada manfaat jangka pendek, seperti penghematan belanja sayur dan edukasi untuk anak-anak. Namun, banyak yang belum memahami sepenuhnya nilai strategis urban farming dalam membangun ketahanan pangan lokal. Untuk itu, strategi kampanye yang kreatif dan pendekatan berbasis komunitas sangat dibutuhkan.

Mahasiswa dan akademisi justru menjadi jembatan penting antara teori dan praktik. Dalam program MSIB, mereka tidak hanya melakukan pendampingan teknis, tetapi juga melakukan branding kampung, edukasi masyarakat, serta promosi melalui media sosial. Peran ini sangat penting dalam meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya urban farming. Terakhir, pihak dunia usaha menunjukkan keterlibatan melalui program CSR dan bantuan produksi. Namun, keterlibatan ini masih bersifat sporadis dan belum terstruktur di semua wilayah Surabaya. Perlu ada mekanisme kolaborasi yang lebih sistematis agar dukungan sektor swasta dapat menjadi bagian permanen dari sistem urban farming kota.

Kontinuitas Antar Pemangku Kepentingan Dalam Pengembangan Urban Farming di Surabaya

Kontinuitas merupakan kelangsungan dari suatu program atau kegiatan yang dijalankan secara terstruktur, dilaksanakan dengan optimal, dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan pencapaian tujuan secara konsisten dan berkelanjutan (Dr. H. Saiful Sagala, 2009). Kontinuitas atau keberlanjutan antar stakeholder dalam pengembangan urban farming di Surabaya memerlukan perhatian khusus. Meskipun pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat melalui kebijakan, pelatihan, dan distribusi sarana produksi, namun penurunan jumlah kelompok tani dari 290 di tahun 2024 menjadi sekitar 130 pada 2025 mengindikasikan adanya kendala pada tingkat implementasi.

Faktor-faktor yang memengaruhi melemahnya kontinuitas program antara lain:

- a. Kurangnya pendampingan intensif – Setelah fase awal pelatihan dan pemberian bantuan, banyak kelompok yang merasa tidak lagi mendapat perhatian sehingga motivasi menurun.
- b. Minimnya insentif ekonomi – Hasil panen yang tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan membuat beberapa kelompok memilih berhenti.
- c. Keterbatasan pasar – Tidak tersedianya skema distribusi dan promosi hasil panen menyebabkan produk urban farming sulit bersaing dengan sayuran pasar konvensional.
- d. Ketidakseimbangan antara jumlah PPL dan kelompok binaan – PPL harus membina puluhan kelompok secara bersamaan, sehingga intensitas pendampingan menjadi terbatas.

Dari sisi masyarakat, keberlanjutan juga sangat dipengaruhi oleh persepsi terhadap manfaat program. Jika warga tidak lagi merasakan dampak langsung seperti ketersediaan pangan rumah tangga, semangat berpartisipasi pun ikut menurun. Edukasi berulang dan pembuktian nyata seperti eduwisata dan pemanfaatan hasil secara mandiri bisa menjadi kunci untuk mengembalikan antusiasme tersebut. Stakeholder dari dunia usaha juga menunjukkan peran penting dalam mendukung kontinuitas, terutama melalui bantuan CSR. Namun sayangnya, peran ini belum merata dan belum menjadi bagian dari sistem kelembagaan kolaboratif. Idealnya, CSR untuk urban farming dapat dijadikan bagian dari kesepakatan jangka panjang antar sektor. Akademisi dan mahasiswa melalui program seperti MSIB memberikan warna baru bagi program urban farming, terutama dalam penguatan branding kampung, edukasi siswa, dan promosi media sosial. Namun demikian,

program ini masih bersifat musiman, sehingga perlu integrasi yang lebih permanen ke dalam kurikulum pengabdian masyarakat.

DKPP merancang program urban farming secara kreatif dan menarik, khususnya untuk menjangkau generasi muda, melalui penyelenggaraan event tematik yang bersifat inklusif. Upaya ini juga diarahkan untuk mendorong terjadinya regenerasi dalam kelompok tani, sehingga kegiatan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak mengalami stagnasi. Keberlangsungan urban farming tidak hanya ditopang oleh kemampuan teknis, tetapi juga melalui pendekatan inovatif dan adaptif. Melalui konsep pelatihan tematik yang menyenangkan, DKPP menumbuhkan minat anak muda sekaligus mendorong rotasi peserta pelatihan sebagai bagian dari regenerasi petani kota. Strategi ini menjadi kunci dalam menjaga dinamika dan relevansi program di tengah tantangan penurunan partisipasi masyarakat.

Urban farming memainkan peranan penting dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat perkotaan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) secara aktif terlibat dalam kegiatan edukatif dan promosi melalui pengembangan kampung wisata edukasi, pemanfaatan media sosial, serta pelaksanaan kompetisi yang terarah. Sementara itu, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) berperan dalam mendampingi dan memberikan motivasi kepada masyarakat, meskipun masih dihadapkan pada tantangan rendahnya minat sebagian warga. Kelompok tani melihat urban farming sebagai sarana untuk mempercantik lingkungan dan memperkuat ikatan sosial antarwarga. Masyarakat pun merasakan dampak langsung, seperti penghematan biaya kebutuhan pangan, lingkungan yang lebih asri, serta meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam membentuk kesadaran bersama dan menciptakan kota yang lebih mandiri serta berkelanjutan melalui praktik urban farming.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan urban farming di Kota Surabaya didukung oleh sinergi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan, seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), penyuluh pertanian, kelompok tani, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada satu aktor, melainkan pada kualitas kolaborasi lintas sektor yang terbangun secara sistematis. Empat aspek utama yang menjadi pilar penguatan program

adalah komitmen, kompetensi, kesadaran, dan kontinuitas. Komitmen tercermin dalam konsistensi kebijakan dan fasilitasi yang diberikan oleh DKPP serta keterlibatan aktif dari penyuluh dan kelompok tani. Kompetensi tampak dari kemampuan teknis dan inovasi yang dimiliki tiap aktor dalam menjalankan perannya. Tingkat kesadaran stakeholder pun menunjukkan kecenderungan positif, meskipun distribusinya masih belum merata. Sementara itu, kontinuitas program menghadapi tantangan serius, seperti penurunan jumlah kelompok aktif, lemahnya regenerasi, keterbatasan pasar, dan belum optimalnya pendampingan secara menyeluruh. Dengan demikian, keberhasilan urban farming di Surabaya tidak semata ditentukan oleh faktor teknis, melainkan juga oleh kemampuan para stakeholder dalam menjaga kerja sama yang berkelanjutan.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk memperkuat pelaksanaan urban farming di masa mendatang. Pertama, perlu adanya sistem pendampingan yang lebih menyeluruh dan merata, dengan menambah jumlah penyuluh atau melibatkan kader lokal agar pembinaan dapat menjangkau kelompok-kelompok yang belum aktif. Kedua, regenerasi kelompok tani harus menjadi prioritas melalui pengembangan pelatihan yang adaptif bagi generasi muda dan integrasi urban farming ke dalam kegiatan pendidikan formal maupun program kampus merdeka. Ketiga, penguatan aspek ekonomi melalui pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian perlu diupayakan, salah satunya dengan menggandeng UMKM, koperasi, atau platform digital sebagai mitra distribusi. Keempat, kolaborasi lintas sektor yang telah berjalan baik perlu diformalkan dalam bentuk kelembagaan atau forum tetap agar dukungan dari pihak swasta dan akademisi tidak bersifat insidental. Terakhir, pendekatan berbasis komunitas perlu diperluas melalui pengembangan kampung tematik urban farming sebagai pusat pembelajaran dan inspirasi, sehingga kesadaran kolektif masyarakat dapat tumbuh secara alami dan berkelanjutan.

Peneliti merekomendasikan agar pelaksanaan program urban farming di Surabaya diperkuat melalui beberapa strategi kunci. Pertama, diperlukan peningkatan kualitas dan jangkauan pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh pertanian, dengan melibatkan lebih banyak kader lokal atau relawan komunitas agar proses pembinaan berjalan lebih intensif dan berkesinambungan di seluruh wilayah. Kedua, regenerasi kelompok tani harus menjadi perhatian utama, terutama dengan melibatkan generasi muda melalui pelatihan tematik, kegiatan berbasis kompetisi, serta integrasi program urban farming ke dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal. Selanjutnya, penguatan sistem pemasaran hasil urban farming juga penting dilakukan, baik melalui dukungan pemerintah maupun

kolaborasi dengan pelaku usaha lokal, koperasi, atau platform digital, agar hasil produksi pertanian perkotaan memiliki nilai jual yang kompetitif. Peneliti juga menyarankan agar kolaborasi lintas sektor yang telah terbangun antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta dapat dilembagakan dalam bentuk forum komunikasi tetap atau perjanjian kerja sama jangka panjang, sehingga tidak bergantung pada momen atau program tertentu saja. Terakhir, perlu dikembangkan pendekatan berbasis kampung tematik sebagai pusat edukasi dan inspirasi masyarakat, yang tidak hanya menampilkan keberhasilan urban farming, tetapi juga menjadi ruang praktik pembelajaran partisipatif. Dengan demikian, urban farming dapat semakin mengakar di tengah masyarakat kota sebagai bagian dari budaya ketahanan pangan lokal yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Gabe, A. D. S., Yani, K., Nur Aisyah, A., & A. K. (2022). Urgensi komunitas, budaya lokal dan ketahanan pangan dalam gerakan urban farming di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(2). <https://doi.org/10.23887/jish.v11i2.45041>
- Hidayat, N. K., Ismail, A., Hastuti, & Raswatie, F. D. (2022). Potensi dan strategi pengembangan usaha tani perkotaan dalam meningkatkan akses pangan yang berkelanjutan di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 27(3), 385–396. <https://doi.org/10.18343/jipi.27.3.385>
- Irawanti, T., Riska, M., & H. R. S. (2013). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup melalui program Surabaya hijau dan bersih. *Jurnal Arsitektur & Lingkungan*.
https://www.academia.edu/53730915/Community_Participation_in_Environmental_Development_Through_Surabaya_Green_and_Clean_Program
- Kartono, K. (1980). *Pengantar metodologi research social*. Alumni.
https://books.google.co.id/books/about/Pengantar_metodologi_research_social.html?id=Cz6XAQAACAAJ
- Rizky. (2024, July 16). Urban farming melon di lahan fasum kian menjanjikan. *Surabaya Online*. <https://surabayaonline.co/2024/07/16/urban-farming-melon-di-lahan-fasum-kian-menjanjikan/>
- Saiful Sagala, H. (2009). *Manajemen strategik dalam peningkatan mutu pendidikan*. Alfabeta.
<https://cvalfabeta.com/product/manajemen-strategik-dalam-peningkatan-mutu-pendidikan/>
- Septya, F., Rosnita, R., Yulida, R., & Andriani, Y. (2022). Urban farming sebagai upaya ketahanan pangan keluarga di Kelurahan Labuh Baru Timur Kota Pekanbaru. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 105–114.
<https://doi.org/10.46576/rjpkm.v3i1.1552>

- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at work: Models for superior performance* (S. M. Spencer, Ed.). Wiley. https://books.google.co.id/books/about/Competence_at_work.html?id=ngcpAQAAAMAAJ
- Steers, R. M. (1988). *Introduction to organizational behavior*. Scott, Foresman. https://books.google.co.id/books/about/Introduction_to_Organizational_Behavior.html?id=OaCHQgAACAAJ
- Triwahyuni, D. A., Pratama, A. J., Budiarto, T., & Bogor, K. (2024). Pengembangan masyarakat melalui program urban farming di Kelurahan Kutisari, Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 23.